

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan Majelis Rakyat Papua(MRP) dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2021, hanya sebatas lembaga representasi kultural saja, meski begitu posisi antara Majelis Rakyat Papua dan DPRD dianggap setara di parlemen, hanya berbeda dalam fungsi dan kewenangannya. Lembaga MRP juga berperan sebagai *Lower House* dalam penyelenggaraan Otonomi Khusus di Papua meski tidak sepenuhnya dapat di sebut sebagai lembaga legislatif, Majelis Rakyat Papua tergolong sebagai lembaga semi legislatif jika di tinjau dari fungsi dan kewenangannya dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2021. Demikian juga bentuk representasi yang digunakan dalam Majelis Rakyat Papua adalah representasi kontruksionis hal ini di dapat melalui kajian Teori Stuart Hall terkait bentuk representasi.
2. Peran Majelis Rakyat Papua dibentuk guna melindungi hak-hak orang asli Papua (OAP) yang selama ini di marginalkan dan menjadi pemicu konflik atas rasialisme yang terjadi di masa lampau, dan memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk turut serta dalam penyelenggaraan Otonomi Khusus di Papua. Melalui Majelis Rakyat Papua (MRP) masyarakat adat dapat turut berpartisipasi dalam politik tidak hanya

menjadi lumbung suara saja. Namun turut serta juga dalam perancangan berbagai kebijakan publik yang dirumuskan melalui Perdasus ataupun Perdasi, dan tanpa perlu mencalonkan diri dalam panggung pemilihan legislatif sebagai legislatif. Serta memastikan pemenuhan hak-hak OAP diutamakan dalam penyelenggaraan Otonomi Khusus di Papua.

3. *Maslahah Mursalah* dapat mencapai kemaslahatan dalam hal ini jenis *Maslahah Tahsiniyyah* ditemukan dalam kebijakan Otonomi Khusus di Papua, dan apabila kebijakan yang sudah dibuat diterapkan dengan baik maka memungkinkan bahwa Undang-Undang No 2 Tahun 2021 dapat meningkatkan taraf hidup Orang Asli Papua dengan terpenuhinya tiga aspek penting yaitu *Dharuri* (Primer), *Hajiyyah* (Sekunder), dan *Tahsiniyyah* (Tersier).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas terdapat saran untuk Pemerintah Pusat, lembaga Majelis Rakyat Papua (MRP), dan Masyarakat, disebabkan karena terbatasnya wewenang Majelis Rakyat Papua (MRP) dan juga perlu adanya kolaborasi antar semua pihak, demi tercapainya tujuan utama dari penerapan kebijakan Otonomi Khusus di Papua, diantaranya sebagai berikut :

a. Untuk Pemerintah Pusat

1. Mengupayakan rekonsiliasi dengan pendekatan yang humanis

Perlu adanya kajian mendalam terkait perubahan Undang-Undang No 2 Tahun 2021. Hal ini disebabkan karena beberapa perubahan yang dilakukan tidak terdapat perubahan yang signifikan seperti paradigma kebijakan yang hanya terfokus pada upaya mencegah disintegrasi Papua dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak sepenuhnya mengupayakan adanya rekonsiliasi penuh melalui jalur diskusi antara Pemerintah dan masyarakat adat Papua.

2. Mendorong percepatan peningkatan SDM di Papua

Pemerintah dalam hal ini selain mendorong peningkatan pembangunan infrastruktur, Pemerintah juga perlu menyadari atas kesenjangan yang terjadi di Papua baik dari segi ekonomi maupun pendidikan. Peningkatan Sumber Daya Manusia di Papua perlu untuk di persiapkan dalam rangka mempersiapkan pembangunan jangka panjang di Papua.

3. Perluasan wewenang untuk Majelis Rakyat Papua (MRP)

Perlu adanya perluasan wewenang untuk lembaga representatif seperti MRP (Majelis Rakyat Papua), dengan demikian MRP

mampu memastikan pemenuhan hak-hak OAP terjamin sepenuhnya baik dalam kebijakan publik daerah maupun dengan program proyek Pemerintah pusat. Berkaca pada kondisi hari ini, Majelis Rakyat Papua belum mampu mengoptimalkan perannya sebagai lembaga yang berhak untuk mengawasi berjalannya Otonomi Khusus karena terbatasnya wewenang yang diberikan kepada lembaga tersebut.

b. Untuk Majelis Rakyat Papua

1. Peningkatan kualitas anggota Majelis Rakyat Papua

Proses penjaringan anggota yang adil perlu di utamakan oleh Majelis Rakyat Papua guna meningkatkan kualitas keanggotaannya, dengan begini walaupun Majelis Rakyat Papua setara kedudukannya dengan DPRD akan tetapi praktik politik tidak sepenuhnya berlaku selayaknya legislatif pada umumnya maka penyeleksian anggota yang jauh lebih memahami kebutuhan masyarakat adat agar memaksimalkan kinerja lembaga Majelis Rakyat Papua dan mampu menyelesaikan tugas nya dengan baik hingga akhir periode jabatannya.

2. Perketat pengawasan dalam penerapan kebijakan Otonomi Khusus di Papua

Memperketat pengawasan lembaga Majelis Rakyat Papua dalam proses pengambilan keputusan agar memastikan setiap kebijakan yang di buat tidak bertentangan dengan nilai-nilai adat dan tidak mengabaikan hak Orang Asli Papua (OAP). Hal ini adalah faktor kunci keberhasilan dari penerapan Otonomi Khusus di Papua. Melalui lembaga yang kuat maka akan terciptanya harmonisasi antar lembaga yang ada dalam Pemerintahan Daerah.

3. Cepat tanggap dalam menampung aspirasi masyarakat adat

Dalam hal ini Majelis Rakyat Papua (MRP) diharapkan dapat selalu tanggap dalam menerima sebuah aduan atau usulan masyarakat demi kebaikan bersama. Hal ini harus di upayakan karena sejatinya Majelis Rakyat Papua di bentuk untuk mengakomodir hak-hak Orang Asli Papua (OAP) guna memberikan kepercayaan kepada masyarakat, dengan tanggapnya Majelis Rakyat Papua maka akan mempermudah segala urusan lembaga tersebut dalam menyatakan sikap atas aspirasi yang diperjuangkan masyarakat adat.

c. Untuk Masyarakat

1. Berperan aktif dalam mengawasi berjalannya Otonomi Khusus di Papua

Dengan hadirnya lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua, maka kesempatan masyarakat adat papua sangat terbuka lebar melalui kedua lembaga tersebut, masyarakat adat papua dapat terlibat aktif dalam segala urusan terkait pengambilan keputusan yang ada di Papua. Selain melalui jalur politik, masyarakat adat papua pun dapat turut aktif mengawasi melalui jalur partisipasi politik non konvensional, seperti aksi demonstrasi untuk melakukan protes terhadap kebijakan yang di buat Pemerintah Daerah apabila kebijakan tersebut tidak memenuhi hak-hak Orang Asli Papua.

2. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan

Masyarakat adat Papua perlu menyadari akan pentingnya pendidikan bagi pembangunan Sumber daya manusia di Papua. Selain itu, berbagai beasiswa untuk Orang Asli Papua yang ingin menempuh pendidikan lebih lanjut, akan tetapi minat yang kurang ini di sebabkan karena rendahnya kesadaran masyarakat adat Papua terhadap pentingnya pendidikan.